

Jurnal Ilmiah

**PEURADEUN**

Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya



**Americanizing Islam As The Price of Assimilation  
(disentagling Religion and Culture)**

*John H. Morgan*

**The Ritual of Marriage  
(An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-south Aceh)**

*Abdul Manan*

**Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik Atas Liberalisme**

*Otto Gusti Madung*

**Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan  
Syariat Islam di Provinsi Aceh**

*Muhibbuthabry*

**Distorsi Terhadap Islam: Analisis Pemberitaan Media Barat**

*Jasafat*

**علي هاشمي هو زعيم الاصلاح في مجال التربية بأنتشية**

*Syabuddin Gade*

**أصول التفسير عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير القرآن**

*Andri Nirwana AN*

**JIP**

International Multidisciplinary Journal  
OAJI: 745/1396982282-2014/R-6.465  
ORCID iDs: 0000-0001-8492-315X

Thomson Reuters: RID-F-6135-2014  
ISI Impact Factor Value 2013 ICR: 0.217  
Google Scholar Index-I:3, I10: 3

 Copernicus Publications  
The Innovative Open Access Publisher

 SCAD Independent  
IAO Accreditation  
4-8362/387/IAO/2014



## MODERNISASI SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA ABAD 21

Syahminan<sup>1</sup>

### Abstract

*Modernization of Islamic education is an absolute demand. Everyone effort, especially teacher, lecturer, politician, stakeholder, state, or private sector surely bring positive impact to education, include Islamic education. However, education system implemented today, in school or ex-scroll, remain contain weakness and deterioration. This paradigm triggers the rise of Islam education modernization spirit. This article show how Indonesian education figure see Islamic education condition in Indonesia. Meanwhile, by and large we would about modernization Islamic education effort that more constructive ad relevant with change and development on this globalization and industrialization era.*

### مستخلص

إصلاح التعليم الإسلامي هو مطلب مطلق. جهد الجميع، وخصوصاً للعلمين، ومحاضر، وسياسي أصحاب المصلحة، والدول والقواطع الخاصر جلب بالتأثير إيجابي على التعليم، وتشمل التربية الإسلامية مع ذلك، تنفيذ نظام التعليم اليوم، في المدرسة أو التمرير السابقين، لا تزال تحتوي على الضعف والتدهور وهذا النموذج يتسبب في ظهور الإسلام ووح الإصلاحات التعليمية هذه المادقين كيف الرقم التعليم إندونيسيا في حالة التعليم الإسلامي في إندونيسيا وفي الوقت نفسه، إلى حد كبير حول الإصلاحات جهود التربية الإسلامية أن إعلان أكثر إيجابية الصلحة التغيير والتطوير على هذه العولمة عصر التصنيع

**Keywords:** *Modern, Islamic Education, Indonesia.*

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, sedang menyelesaikan Doktoral pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, aktif sebagai pengelola Pusat Bahasa dan Pengembangan Tenaga Pengajar UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## **A. Pendahuluan**

Sejarah perkembangan pendidikan Islam dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu kira-kira pada abad kedua belas Masehi (Mahmud Yunus, 1984: 10). Salah satu statemen yang sulit di sangkal, bahwa Islam sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia sampai hari ini. Eksistensi Islam di Indonesia sangat mempengaruhi kultur budaya masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dan terbesar di dunia merupakan bukti bahwa Islam sangat berpengaruh terlebih dalam pembinaan masyarakat melalui pendidikan yang sudah ada di pesisir terutama di Aceh dan Selat Malaka.

Sejak Islam mulai masuk ke tanah Aceh (1290 M) pendidikan dan pengajaran mulai lahir dan tumbuh dengan amat suburnya. Terutama setelah berdiri kerajaan Islam di Pasai dan banyak Ulama Islam yang mendirikan pesantren seperti Tengku di Geuredong, Tengku Cut Maplam (Mahmud Yunus, 1984: 172).

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada awal permulaan masih dilaksanakan secara tradisional dan belum tersusun kurikulum seperti saat ini. Baik itu pendidikan di surau maupun pesantren. Modernisasi pendidikan Islam diakui tidaklah bersumber dari kalangan Muslim sendiri, melainkan diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad 19. Program modernisasi pendidikan Islam mempunyai akar-akarnya tentang "modernisasi" pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain modernisasi pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan gagasan dan program modernisasi Islam. Kerangka dasar yang berada dibalik modernisasi Islam secara keseluruhan adalah modernisasi pemikiran dan kelembagaan Islam merupakan persyaratan bagi kebangkitan kaum muslim di masa modern (Azyumadi Azra, 1990).

Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Harun Nasution, 1975: 3). Modernisasi juga dikenal dengan istilah reformasi, yang berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada

suatu masa (Wikipedia, 2013). Dalam bahasa Indonesia telah selalu dipakai kata modern, modernisasi dan modernisme, seperti yang terdapat umpamanya dalam “aliran-aliran modern dalam Islam” dan “Islam dan modernisasi” (Tabrani. ZA, 2013: 66).

Istilah *modern* atau *modernisasi*<sup>2</sup> menunjukkan pada sesuatu yang baru atau perubahan-perubahan yang terjadi pada pola dan tatanan kehidupan manusia. Istilah ini muncul dari masyarakat barat yang mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha mengubah paham-paham adat-istiadat, institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tujuan utama kemunculan modernisasi adalah menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan modern. Dari modern inilah, di Barat muncul sekularisme (Adeng Muchtar Ghazali, 2005: 183).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam, terutama sesudah pembukaan abad ke-19 M, yang dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan Periode Modern (Adeng Muchtar Ghazali, 2005: 183). Pada awal abad ke-20 umat Islam Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam bentuk kebangkitan, agama, perubahan dan pencerahan. Secara umum periode ini sering disebut Zaman Bergerak atau era Kebangkitan Nasional, yang diwarnai dengan suasana hingar-bingar penuh dengan pergolakan (Muhammad Ali, 2006: 25). Di antara motivasinya adalah dorongan untuk mengusir penjajah. Meskipun ada dorongan kuat untuk melawan penjajahan, akan tetapi umat Islam sadar bahwa tidak mungkin melawan penjajah hanya dengan cara tradisional.

Umat Islam menyadari bahwa dibutuhkan suatu perubahan-perubahan yang nyata. Umat Islam Indonesia menyadari bahwa perlu

---

<sup>2</sup> “Modernisasi” vs “Transformasi” merupakan paradigma pembangunan yang akhir-akhir ini sering diperdebatkan. Paradigma “modernisasi” sering kali mengandaikan bahwa ada sekelompok elite dalam masyarakat yang, dengan *power* yang dimilikinya, mampu melakukan perubahan sosial. Sedangkan paradigma “transformasi” menginginkan agar perubahan sosial itu hendaknya dilakukan oleh masyarakat sendiri secara demokratis. Apa yang penting dalam konteks ini ialah bahwa karena kaum elite sering menganggap dirinya paling terdidik, paling rasional, paling tahun ke arah mana seharusnya masyarakat diubah, sehingga mereka berusaha agar pusat pengambilan keputusan dalam perubahan itu tetap berada di tagannya (lihat dalam Moeslim Abdurrahman, 1997: 258, lihat juga dalam Tabrani. ZA, 2013: 64).

kembali mengkaji kembali ajaran-ajaran Islam yang pada akhirnya membawa umat Islam untuk melawan imperialisme Barat. A. Qodri Azizy, dkk. (2005: 223) menjelaskan bahwa, diperlukan usaha ekstra keras dari umat Islam untuk mengejar ketertinggalannya antara lain dengan berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang dilakukan secara simultan dengan sasaran penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam menjawab tantangan perubahan dan persoalan-persoalan dalam berbagai aspek kehidupan. Kepada manusia modern Islam tidak memberikan sekumpulan pemecahan terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi, tetapi sebuah pemilihan arah yang sangat berbeda (Altaf Gauhar, 1982: 333).

Modernisasi pendidikan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah reformasi. Emil Salim menekankan arti reformasi untuk perubahan dengan melihat keperluan masa depan. Sejak awal abad ke-20, masyarakat Muslim di Indonesia telah melakukan modernisasi. Modernisasi ini dirintis oleh tokoh pelopor pembaharu pendidikan Islam Minangkabau, seperti Syekh Abdullah Ahmad, Zainudin Labai El-Yunus dan lain-lain, juga dalam bentuk organisasi organisasi Islam seperti Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan Nahdatul Ulama di daerah lain (Harun Asrohah, 199: 154-169). Akan tetapi, perubahan itu memiliki motivasi yang betul-betul pragmatis, yaitu bagaimana mengimbangi pendidikan umum yang berkembang pesat yang semata-mata diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan kolonialisme (A. Syafi'i Ma'arif, 1991: 131).

## **B. Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia**

Pendidikan adalah keindahan proses belajar mengajar dengan pendekatan manusianya (*man centered*), dan bukan sekadar memindahkan otak dari kepala-kepala atau mengalihkan mesin ke tangan, dan sebaliknya. Pendidikan lebih dari itu, pendidikan menjadikan manusia mampu menaklukkan masa depan dan menaklukkan dirinya sendiri dengan daya pikir, daya zikir, dan daya ciptanya.

Dari sudut pandang masyarakat, pendidikan adalah proses sosialisasi, yakni memasyarakatkan nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dalam kehidupan. Sosiolog Emile Durkheim, dalam karyanya *Education and Sosiology* (1956), sebagaimana dikutip Saefudin menyatakan bahwa pendidikan

merupakan produk masyarakat itu sendiri, yaitu mampu hidup konsisten mengatasi ancaman dan tantangan masa depan. Nabi SAW bersabda: "Didiklah anak-anak kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamanmu". Jadi, pendidikan harus berorientasi masa depan, harus futuristik. Sementara itu, dari sudut pandang individu, pendidikan adalah proses perkembangan, yakni perkembangan potensi yang dimiliki secara maksimal dan diwujudkan dalam bentuk konkret, dalam arti perkembangan menciptakan sesuatu yang baru dan berguna untuk kehidupan masa mendatang (A.M. Saefudin, 1995: 125). Abdurrahman al-Bani sebagaimana dikutip Adi Sasono menggambarkan bahwa pendidikan mencakup 3 faktor yang mesti dilakukan secara bertahap.

- 1) Menjaga dan memelihara anak.
- 2) Mengembangkan potensi dan bakat anak sesuai dengan minat/bakatnya masing-masing.
- 3) Mengarahkan potensi dan bakat anak agar mencapai masyarakat dan kesempurnaan. (Adi Sasono, 1998: 87)

Dalam studi kependidikan, sebutan "Pendidikan Islam" pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Dapat juga digambarkan bahwa pendidikan yang mampu membentuk "manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan anggun dalam moral". Hal ini berarti menurut cita-citanya pendidikan Islam memproyeksi diri untuk memproduksi "insan kamil", yaitu manusia yang sempurna dalam segala hal, sekalipun diyakini baru (hanya) Nabi Muhammad SAW yang telah mencapai kualitasnya.

Pendidikan Islam dijalankan atas roda cita-cita yang demikian dan sebagai alternatif pembimbingan manusia agar tidak berkembang atas pribadi yang terpecah, *split of personality*, dan bukan pula pribadi timpang. Manusia diharapkan tidak materialistik atau aspiritualistik, amoral, egosentrik atau antroposentris, sebagaimana yang secara ironis masih banyak dihasilkan oleh sistem pendidikan kita dewasa ini. Untuk meraih tujuan yang ideal itu, maka realisasinya harus sepenuhnya bersumber dari cita-cita al-Qur'an, sunnah, dan ijihad-ijihad yang masih berada dalam ruang lingkungannya (Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ, 1997: 35-36).

Muhammad Athiyah al-Abrasyi (1970: 165), menyatakan bahwa prinsip utama pendidikan Islam adalah pengembangan berpikir bebas dan mandiri secara demokratis dengan memperhatikan kecenderungan peserta didik secara individual yang menyangkut aspek kecerdasan akal dan bakat yang dititikberatkan ialah prinsip pendidikan Islam: demokrasi dan kebebasan, pembentukan akhlak karimah, sesuai kemampuan akal peserta didik, diversifikasi metode, pendidikan kebebasan, orientasi individual, bakat keterampilan terpilih, proses belajar dan mencintai ilmu, kecakapan berbahasa dan dialog, pelayanan, sistem universitas, dan rangsangan penelitian.

Dengan meninjau kembali program pendidikan strata satu (S1) di semua jurusan yang ada di IAIN, baru ditunjukkan untuk memahami dan mengamalkan hasil dari pemahaman para ulama masa lalu terhadap wahyu. Belum diarahkan untuk mengembangkannya, juga belum diarahkan untuk memenuhi wahyu secara langsung (Ditbinperta, 1995: 8).

Selanjutnya, Dawam Rahardjo sebagaimana dikutip Tabrani dan Syamsul Arifin (1994: 170), juga mengatakan bahwa sistem pendidikan kita dewasa ini lebih mengutamakan makna bagaimana orang menerima pengetahuan, tetapi tidak membentuk orang untuk dapat menciptakan dan tidak merangsang orang untuk berpikir. Sistem pendidikan kita hanyalah merupakan sistem pendidikan yang orientasinya pada sistem bukan pada keterampilan.

Dalam Al-Qur'an (Q.S: 269) dan (Q.S:190-191) bahwa Ulul Albab (cendekiawan muslim) itu adalah kelompok intelektual beriman yang mampu menyatukan kekuatan zikir dan fakir (refleksi dan penawaran), di samping punya kebajikan (hikmah) dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah dunia dan kemanusiaan (A. Syafi'i Ma'arif, 1995: 32). Di sisi lain, H.A.R Tilaar (1998: 208), mengutarakan pendidikan tinggi Islam di Indonesia dewasa ini (IAIN) dengan paradigmanya menganut paham dualisme ilmu pengetahuan.

Dalam hal ini, A. Malik Fajar sebagaimana dikutip Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ memberikan penilaian objektif terhadap animo calon peserta didik di lembaga pendidikan Islam: "Kurang tertariknya masyarakat untuk memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam bukan terjadi karena adanya pergeseran nilai atau ikatan keagamaannya yang memulai

memudar, melainkan sebagian besar kurang menjanjikan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan saat ini maupun mendatang. Padahal paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, yaitu nilai (agama), status sosial, dan cita-cita..." (Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ, 1997: 40, lihat juga dalam Tabrani dan Syamsul Arifin, 1994: 166).

Sampai saat ini, pemikiran dan pendidikan Islam akan terus menghadapi dilema berkepanjangan. Secara praktis pemikiran dan pendidikan Islam tidak bisa keluar dari pergumulan pemikiran ilmiah yang lahir dari pemikiran Barat Modern. Melalui jalan ini diharapkan akan muncul berbagai konsep sebagai pemecahan problem, dilema pemikiran, dan pendidikan Islam, serta pemecahan terhadap persoalan kemanusiaan Universal (Muslih Usa dan Aden Wijzan AZ, 1994: 97).

### **C. Sistem Pendidikan Islam Dewasa ini dan Problematikanya**

Dalam sejarah umat manusia, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang (primitif), hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dijadikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya dalam dinamika perubahan kebudayaan masyarakat di masa datang. Karena itu, upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan blue print peradaban bangsa itu di masa mendatang. Upaya ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia.

Lebih jauh dari itu, M. Natsir (1973: 77) pernah menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat tersebut. Pernyataan M. Natsir ini menunjukkan bahwa pendidikan memegang peran yang sangat vital dalam bagi menentukan maju mundurnya kehidupan manusia. Pendidikan menjadi pemicu masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek kehidupan demi mencapai kemajuan, dan untuk menjunjung perannya di masa datang. Hal ini terbukti dalam kehidupan sekarang pendidikan tampil dengan daya pengaruh yang sangat besar dan menjadi variabel pokok masa depan manusia.

Perubahan peradaban dan kebudayaan masyarakat, dewasa ini, berjalan secara cepat dan berkelindan. Perubahan ini tentu saja akan mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pendidikan sebagai *agent of change*. Pendidikan yang akan dipilih masyarakat sudah barang tentu yang dapat mengembangkan kualitas dirinya sesuai dengan perkembangan perubahan itu. Sebaliknya, pendidikan yang kurang memberikan janji masa depan tidak akan mengundang minat atau antusiasme masyarakat. Sesuai dengan ciri masyarakat seperti ini, maka pendidikan yang akan dipilihnya adalah pendidikan yang dapat memberikan kemampuan secara teknologis fungsional, individual, informatif, dan terbuka. Dan yang lebih penting lagi, kemampuan secara etik dan moral yang dapat dikembangkan melalui agama. Dari semua itu, pada akhirnya kita mempertanyakan posisi dan peran pendidikan Islam di Indonesia. Dalam konteks inilah akan dijumpai betapa pendidikan Islam—yang dari segi kuantitas menunjukkan perkembangan yang dinamis mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi—menghadapi berbagai persoalan. Tidak saja pada persoalan tataran normatif-filosofis, tetapi juga menyangkut orientasi kultural di masa depan. Rangkaian persoalan itu tidak dapat dipisahkan, karena terdapat kaitan yang bersifat *causal relationship*. Karena itu, langkah penyelesaiannya harus bersifat menyeluruh dan tidak bisa dengan cara parsial atau kasuistik.

### **1. Dinamika Masyarakat: Pergeseran Pandangan terhadap Pendidikan**

Secara umum, perubahan dipahami sebagai terjadinya perubahan di semua sektor kehidupan masyarakat. Perubahan dapat terjadi di bidang norma-norma, nilai-nilai, pola-pola perilaku, organisasi, susunan dan stratifikasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan (Selo Soemarjan dan Soelaman Soemardi, 1974). Dalam kajian teoritik sering kali diperdebatkan, apakah perubahan atau dinamika dalam masyarakat merupakan perubahan budaya (*cultural change*) atau perubahan sosial (*social change*). Yang pertama berkaitan dengan perubahan yang berhubungan dengan ide-ide dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan perubahan di bidang pola hubungan dalam masyarakat dan perkembangan kelembagaannya. Kedua perubahan itu mempunyai hubungan timbal balik.

Dipandang dari perspektif fungsional—suatu teori yang berpandangan bahwa masyarakat merupakan kesatuan sistem yang saling

tergantung dan berhubungan—pendidikan dituntut melakukan penyesuaian terus-menerus dengan perkembangan masyarakat. Selain itu pendidikan juga harus memainkan peran yang terarah sejalan dengan karakteristiknya selaku institusi teleologis. Di sinilah dituntut kemampuan proyektif dari pendidikan dalam menangkap kecenderungan yang akan terjadi di masa depan (lihat dalam A. Malik Fajar, 1999: 75-81).

Berkaitan dengan kemampuan proyektif ini, yang sering ditangkap dengan jelas dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah adanya pergeseran pandangan terhadap pendidikan seiring dengan tuntutan masyarakat (*social demand*) yang berkembang dalam skala yang lebih makro. Kini, masyarakat melihat pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks waktu sekarang, tetapi juga dipandang sebagai pembentuk citra kebudayaan bangsa untuk waktu yang akan datang. Menurut Musya Asy'ari (1984: 14), dinamika dan perkembangan kehidupan umat manusia yang dahsyat sekarang ini, terjadi karena adanya pergerakan dinamis pengetahuan manusia. Yakni, proses perkembangan ilmu pengetahuan yang membentuk kebudayaan umat manusia di suatu bangsa. Harus disadari, secara ontologis, kebudayaan ada karena adanya manusia. Ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi generator penggerak dan pembentuk kebudayaan. Karena itu, jika pendidikan kita masih saja terus menerus jalan di tempat dan tidak mengikuti dinamika dan perkembangan kehidupan manusia, maka tidak mustahil jika citra kebudayaan bangsa tetap akan memegang predikat tertinggal.

Di sisi lain pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi, baik modal maupun manusia (*human and capital investmen*) untuk membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sekaligus mempunyai kemampuan produktif di masa depan yang diukur dari tingkat penghasilan yang diperolehnya (Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, 1993). Karena itu, tidak mengherankan apabila pendidikan selalu dipertimbangkan nilai imbalannya (*rate of return*), berapa besar investasi serta keuntungan atau efektivitas yang akan diperolehnya. Pertimbangan demikian tampaknya tidak hanya berlaku dalam kebijakan ekonomi makro suatu negara, tetapi sudah berlaku secara universal dalam masyarakat. Karenanya, wajar saja apabila saat ini masyarakat sudah mulai selektif dalam memilih lembaga pendidikan dari

tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Perubahan demikian merupakan akibat dari rangkaian perubahan yang terjadi dalam skala makro. Artinya, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dalam bidang yang lain mempengaruhi pula pandangan dan pilihan masyarakat terhadap pendidikan. Inilah yang disebut masyarakat sebagai kesatuan sistem.

Dalam kajian sosiologis digambarkan, bahwa perubahan tersebut bersifat universal (*universal change*) yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Dan bahkan berjalan secara revolutif seperti terjadinya revolusi di bidang teknologi, komunikasi, pendidikan dan media masa (M. Francis Abraham, 1980). Terjadinya revolusi ini secara sistematis berpengaruh terhadap ide, norma, perilaku, hubungan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat dengan corak dan cirinya yang lebih baru. Ahmad Watik Pratiknya (dalam A. Malik Fajar, 1999: 77) lebih jelas menggambarkan corak dan ciri-ciri masyarakat yang akan berkembang di masa sekarang dan masa yang akan datang. *pertama*, terjadinya teknologisasi kehidupan sebagai akibat adanya loncatan revolusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat tekonologis ditandai dengan adanya pembakuan kerja dan perubahan nilai, yaitu makin dominannya pertimbangan efisiensi dan produktivitas.

*Kedua*, kecenderungan perilaku masyarakat yang semakin fungsional. Dalam masyarakat seperti ini hubungan sosial hanya dilihat dari sudut kegunaan dan kepentingan semata. Keberadaan seseorang sangat ditentukan sejauh mana ia fungsional bagi orang lain. Karena itu kemampuan seseorang secara individual sangat dibutuhkan. Jadi dalam masyarakat seperti itu terjadi pergeseran pola hubungan sosial dari *affective* ke *effective neutral*, sebagaimana dikatakan oleh Parson, yakni perubahan dari hubungan yang mempribadi dan emosional ke hubungan yang tidak mempribadi dan berjarak. *Ketiga*, masyarakat padat informasi. Dalam masyarakat seperti ini, keberadaan seseorang sangat ditentukan oleh berapa banyak dan sejauh mana ia menguasai informasi. Keempat, kehidupan yang makin sistemik dan terbuka, yakni masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem yang terbuka (*open system*).

## 2. Kondisi Pendidikan di Indonesia di Tengah Arus Perubahan

Mencermati kondisi pendidikan di Indonesia dewasa ini, membawa kepada kesadaran bahwa sebenarnya telah banyak dilakukan berbagai pembaruan di berbagai bidang. Hanya saja, tujuan pembaruan itu pada

akhirnya adalah sebatas “untuk menjaga agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada jenjang pendidikan berikutnya” (Suyanto dan Djihad Hasyim, 2000: 22). Tampaknya hal itu disebabkan karena, “pendidikan nasional terperangkap di dalam sistem kehidupan yang operatif sehingga telah terkungkung di dalam paradigma-paradigma yang tunduk kepada kekuasaan otoriter dan memperlakukan rakyat banyak” (H.A.R. Tilaar, 1998: 26). Era rezim Orde Baru yang otoriter dan birokratis telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif; kendatipun secara jujur kita juga harus mengakui bahwa rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasinya yang cukup baik di bidang pendidikan berupa kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

Pendidikan pada masa Orde Baru memiliki empat ciri utama, yaitu *pertama*, sistem yang kaku dan sentralistik, yaitu suatu sistem pendidikan yang terperangkap di dalam kekuasaan otoritas pasti dan sistem birokrasi yang kaku sifatnya. Ciri ini tidak hanya menyebabkan terbunuhnya kreativitas dan potensi anak didik khususnya, tetapi juga tenggelamnya pluralitas budaya lokal. Barangkali tidaklah berlebihan kalau ciri ini menyebabkan *get nothing and lose everything*. *Kedua*, sistem pendidikan nasional di dalam pelaksanaannya telah diracuni oleh unsur-unsur Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan *koncoisme* (*cronyism*). Akibatnya, sistem pendidikan tidak mengutamakan kualitas, tetapi mementingkan *interest* pribadi maupun kelompok. *Ketiga*, sistem pendidikan tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah sirna dan diganti dengan praktik-praktik “memberatkan” rakyat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas (H.A.R. Tilaar, 1998: 26). *Keempat*, pada kenyataannya sistem pendidikan kita sekarang ini belum mengantisipasi masa depan dan masyarakat “madani” artinya belum mampu menyiapkan output yang sesuai dengan permintaan pasar dan kondisi riil perubahan masyarakat, kurang memiliki kemampuan bersaing secara kompetitif dan kreatif, dan hanya sekedar mengandalkan ijazah resmi dari bidang studi dan dari suatu lembaga pendidikan tertentu dengan kemampuan yang sangat terbatas atau pas-pasan.

Secara umum, kondisi pendidikan Islam di Indonesia, juga menghadapi nasib yang sama dengan pendidikan nasional. Kualitas lembaga pendidikan Islam secara umum masih menyedihkan. Meskipun telah ada beberapa madrasah yang sudah mampu mengungguli kualitas sekolah umum, tetapi secara umum kualitas madrasah dan sekolah-sekolah serta perguruan tinggi Islam masih belum memadai. Citra lembaga pendidikan Islam relatif rendah. Adalah suatu kenyataan bahwa dalam rangkaian kelulusan Ujian Nasional (UN), madrasah dan sekolah-sekolah Islam pada umumnya, berada dalam urutan bawah sekolah-sekolah negeri dan swasta lainnya (H.M. Bambang Pranowo, 2002: 36-37).

Secara lebih khusus, pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang lebih kompleks daripada pendidikan nasional, yaitu berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Kelemahan juga terlihat pada kualitas dan kuantitas guru yang masih belum memadai. Guru adalah kunci keberhasilan sekolah. Jika gurunya berkualitas rendah dan rasio guru murid tidak memadai, maka out put pendidikannya dengan sendirinya akan rendah. Gaji guru secara umum masih kecil. Tidak sedikit guru madrasah swasta yang gajinya di bawah tingkat upah minimum regional (UMR). Latar belakang siswa-siswi lembaga pendidikan Islam pada umumnya dari kelas menengah ke bawah.

Memperhatikan kelemahan-kelemahan pendidikan Islam di atas, tampaknya pendidikan Islam menghadapi tantangan yang begitu kompleks, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal yang dihadapi menyangkut dengan sisi pendidikan Islam sebagai program pendidikan, yaitu persoalan dikotomi, pendidikan, orientasi pendidikan Islam yang kurang tepat, sempitnya pemahaman terhadap esensi ajaran Islam, perencanaan dan penyusunan materi, metodologi dan evaluasi yang kurang tepat, pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam masih bersikap eksklusif dan belum mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan yang lainnya. Tantangan eksternal yang dihadapi berupa berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada munculnya *scientific criticism* terhadap pelajaran agama yang bersifat konservatif, tradisional, tekstual dan *skriptualistik*. Tantangan pada era globalisasi di bidang informasi, perubahan

sosial ekonomi dan budaya dengan segala dampaknya, kemajemukan masyarakat yang beragam yang masih belum siap untuk berbeda paham dan justru cenderung bersikap apologis, fanatik, absolutis, serta *truth claim* yang dibungkus dalam simpul-simpul *interest*, baik interest pribadi maupun yang bersifat politik ataupun sosiologis (Muhaimin et.al., 2001: 92).

Adanya tantangan eksternal tersebut membuat kita semakin sadar dan harus mengakui dengan jujur bahwa pendidikan Islam hingga saat ini kelihatan sering terlambat merumuskan diri untuk merespons perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat kita sekarang dan masa yang akan datang. Sistem pendidikan Islam kebanyakan masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi, dan matematika modern. Padahal keempat ilmu ini mutlak diperlukan dan pengembangan teknologi canggih. Ilmu-ilmu eksakta ini belum mendapat apresiasi dan tempat yang sepatutnya dalam sistem pendidikan Islam (Azyumardi Azra, 1999: 59).

Di sisi lain, kondisi pendidikan Islam sekarang ini berada pada posisi *determinisme historik* dan *realisme*. Artinya, pada sejarah awalnya pendidikan Islam pernah mencapai puncak kejayaannya. Ketika itu dunia Islam mampu melahirkan tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang berkaliber dunia dan bersama dengan perkembangan ilmu tersebut berkembang dan maju dalam peradaban Islam. Tetapi sekarang ini, kondisi yang terjadi sebaliknya, artinya dalam realitas praktis sekarang ini pendidikan Islam seakan-akan tidak berdaya karena dihadapkan dengan realitas perkembangan masyarakat industri modern (M. Rusli Karim, 1991: 129). Dalam posisi yang sangat tergantung dengan peradaban industri ini, pendidikan Islam belum mampu mengintegrasikan ilmu sebagaimana idealisasinya. Hal ini pun didukung oleh sebagian umat Islam yang kurang meminati ilmu-ilmu umum dan bahkan sampai pada tingkat mengharamkan. Dalam kondisi ini, dikotomi masih sangat kuat dan pelaksanaan pendidikan Islam hanya mampu menyesuaikan diri dengan kecenderungan pendidikan yang lebih berorientasi pada materialistis dalam segala aspeknya dan kondisi ini pun cukup diperparah dengan kuatnya kecenderungan sekularistik pada sistem pendidikan Islam dewasa ini.

Menyadari kondisi pendidikan Islam, sebagaimana pendidikan nasional, selama ini sebenarnya juga telah ada berbagai usaha modernisasi

dan peningkatan kualitas pendidikan Islam. Hanya saja, kita menyadari bahwa usaha modernisasi dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh. Sebab usaha modernisasi atau peningkatan itu dilakukan sekenanya atau seingatnya, maka tidak terjadi perubahan esensial dalam sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam tetap cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat *future oriented*. Selain itu, kalau kita mau jujur, sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional (Azyumardi Azra, 1999: 59). Dengan kenyataan ini, maka sebenarnya sistem pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari perubahan. Dan hanya dengan respons yang tepat, pendidikan Islam dapat diharapkan lebih fungsional dalam mempersiapkan anak didik untuk menjawab tantangan perkembangan Indonesia modern yang terus semakin kompleks (Azyumardi Azra, 1999: 57-58).

Kompleksitas tantangan itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa berbarengan dengan semakin tingginya tuntutan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kian disadari pula perlunya pemantapan penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Gejala ini terlihat jelas di dalam masyarakat kita. Pada satu segi, kita melihat dan merasakan terjadinya akselerasi pembangunan yang menuntut iptek yang kian canggih, tetapi pada saat yang sama kita menyadari pula bahwa agama semakin diperlukan untuk menyantuni masyarakat yang menghadapi keguncangan nilai atau gegar budaya. Dalam konteks terakhir ini, kita melihat terjadinya “kebangkitan agama” atau dengan istilah yang lebih moderat, intensifikasi penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran agama.

Perkembangan ini tentu saja sangat sehat dan positif. Singkat kata berbeda dengan pengalaman proses modernisasi di banyak negara Barat, di mana terjadi proses sekularisasi dan penyingkiran agama dalam kehidupan publik, sebaliknya di Indonesia pembangunan justru menghasilkan gairah atau antusiasme baru dan peningkatan kesetiaan kepada agama. Di Indonesia kita melihat begitu jelas kaitan antara peningkatan kondisi ekonomi

masyarakat dengan intensifikasi penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Dengan demikian baiknya ekonomi masyarakat, semakin banyak pula dibangun rumah-rumah ibadah, atau semakin banyak pula warga kita yang mampu menunaikan ibadah haji yang menuntut biaya besar itu.

### 3. Pendidikan Islam yang Ideal: Sebuah Gagasan

Dengan mempertimbangkan semua perkembangan dan dinamika masyarakat itu, sistem pendidikan Islam jelas selain mesti berorientasi kepada pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam diri anak didik, seperti selama ini dilakukan, kini harus memberikan penekanan khusus kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, sistem pendidikan Islam harus memenuhi dua tantangan pokok tadi, pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua penanaman pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Kedua-duanya dilakukan secara integral, humanistik, pragmatik, dengan memperhatikan budaya lokal dan didasarkan kepada nilai-nilai religiusitas. Hanya dengan cara ini pendidikan Islam bisa fungsional di tengah-tengah masyarakat dalam menyiapkan dan membina SDM masa depan menuju tatanan masyarakat global<sup>3</sup> seutuhnya, yang menguasai iptek dan berkeimanan dan mengamalkan agama. Hanya dengan cara ini pula kita secara sistematis dan programatis dapat melakukan pengentasan kemiskinan – secara bertahap namun pasti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi pendidikan yang ideal, yaitu pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik, dan berakar budaya kuat. *Pertama*, pendidikan yang integralistik mengandung komponen-komponen kehidupan yang meliputi: Tuhan, manusia, dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya kehidupan yang baik, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual-perasaan, dan individu-sosial, serta integralistik dalam orientasi pendidikan

---

<sup>3</sup> Tatanan global mensyaratkan terpenuhinya empat kewajiban etika global. Empat kewajiban itu adalah: pertama komitmen terhadap budaya anti kekerasan dan hormat terhadap kehidupan; kedua, komitmen terhadap budaya solidaritas dan keteraturan ekonomi; ketiga, komitmen terhadap budaya toleransi dan hidup penuh kebenaran; dan keempat, komitmen terhadap equalitas dan komitmen partnership (lihat dalam Hans Kung, terj. Ali Noer Zaman, 2002: 187).

yang filosofis dengan kepentingan pragmatis.<sup>4</sup> Pendidikan yang integralistik diharapkan bisa menghasilkan manusia yang memiliki integritas tinggi, yang bisa bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhan-nya, yang bisa menyatu dengan dirinya sendiri (sehingga tidak memiliki kepribadian belah), menyatu dengan masyarakat (sehingga bisa menghilangkan disintegrasi sosial), dan bisa menyatu dengan alam (sehingga tidak membuat kerusakan).

*Kedua*, pendidikan yang humanistik memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebagai makhluk batas—antara hewan dan malaikat—ia menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang dan sebagainya. Pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembalikan hati manusia di tempatnya yang semula, dengan mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk. Manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan yang humanistik diharapkan bisa berpikir, berasa, dan berkemauan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bisa mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik, dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan dan sebagainya.

*Ketiga*, pendidikan yang pragmatik adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani, seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya; juga yang bersifat rohani seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, kasih sayang dan keadilan maupun kebutuhan sukmawi seperti dorongan untuk berhubungan dengan Tuhan. Pendidikan yang pragmatik diharapkan

---

<sup>4</sup> Alasan mendasar perlunya integralistik ini, pertama, pendidikan pada dasarnya sebagai suatu instrumen strategis pengembangan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, misalnya potensi moral yang menjadikan manusia secara esensial dan eksistensial sebagai makhluk religius. Kedua, realitas sosiologis yang selalu terlibat dengan proses dialektika fundamental dalam kehidupan masyarakat. dalam proses ini, manusia tidak hanya recipient, tetapi sekaligus secara dialektikal sebagai subyek yang terlibat secara aktif dan kreatif dengan proses kebudayaan di samping tidak menutup kemungkinan mendapatkan pengaruh, baik secara negatif maupun positif. Ketiga, terjadinya perubahan secara continue menuju masa depan, baik secara evolutif maupun revolutif.

dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.

*Keempat*, pendidikan yang berakar budaya kuat, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa atau kelompok etnis tentang. Pendidikan yang berakar budaya kuat diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri, dan membangun peradaban berdasarkan budayanya sendiri yang merupakan warisan monumental dari nenek moyangnya. Tetapi bukan orang yang anti kemodernan, yang menolak begitu saja arus transformasi budaya dari luar (*al-muhafadhah 'ala al'qadim al-sholih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah*).

Sebagai pendidikan yang ideal, maka sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan etik, sehingga mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki kematangan profesional serta sekaligus hidup dalam nilai-nilai agama (Muhaimin et.al., 2001: 46). Harapan ini tidaklah berlebihan mengingat dalam proses, pendidikan Islam harus berusaha untuk membangun manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan dan ketakwaan sebagai realisasi dari adanya relasi vertikal-horizontal dengan nilai-nilai ilahiyah.

Dengan demikian, pendidikan Islam diharapkan menjadi wahana yang strategis bagi upaya peningkatan mutu kehidupan dengan terbentuknya berbagai pilihan dan kesempatan untuk mengembangkan diri di masa depan, karena pendidikan memiliki peran sentral dalam proses mendorong individu dan masyarakat untuk mencapai kemajuan pada semua aspek kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam mengadakan perubahan pendidikan adalah merumuskan kerangka dasar filosofis yang sesuai dengan ajaran Islam kemudian mengembangkan teori pendidikan yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia yang hubungannya dengan masyarakat, lingkungan, dan ajaran Islam. Tanpa kerangka dasar "filosofis" dan "teoritis" yang kuat, maka pembaruan pendidikan Islam tidak mempunyai

fondasi yang kuat dan juga tidak mempunyai arah yang pasti. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka dasar sistematis, yaitu kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan Islam harus ditempatkan dalam konteks supra-sistem masyarakat, bangsa dan negara serta kepentingan umat di mana pendidikan itu diterapkan. Apabila terlepas dari konteks ini, pendidikan akan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam menghadapi tuntutan perubahan.

#### **4. Problematika Pendidikan Islam**

Sebagaimana kita ketahui, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia, orang selalu tidak puas dengan hasil-hasil yang diperoleh oleh perguruan tinggi. Masyarakat selalu menuntut lebih dari apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Hal itu disebabkan perubahan dalam masyarakat dan perguruan tinggi menjadi lebih cepat. Problem-problem pendidikan Islam itu antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan pemikiran Islam klasik, yaitu pemikiran sebagai produk masyarakat ratusan tahun yang lalu, yang jauh berbeda dari status sosial di mana pendidikan Islam harus berperan di dalamnya. Akibatnya, setiap materi keislaman ditempatkan dalam susunan kurikulum yang kurang memberi peluang pengembangan daya kritis dan kreatif dengan metode yang relevan dan banyak dikaji dalam pemikiran modern. Misalnya, rumusan tujuan setiap bidang studi, lebih ditekankan sebagai pendidikan profesi daripada pengembangan ilmu dalam repetisi formulasi "mengetahui, menghafal, dan mengamalkan" di semua fakultas dan jurusan di lingkungan IAIN (Muslih Usa dan Aden Wijzan AZ, 1994: 97-98).
2. Sistematisasi jurusan di berbagai fakultas di IAIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) lain, misalnya juga kurang memiliki dasar teoritis dan relevansi dengan dunia objektif umat (Muslih Usa dan Aden Wijzan AZ, 1994: 97-98).
3. Permasalahan yang berkaitan dengan situasi objektif pendidikan Islam, yaitu adanya krisis konseptual. Krisis konseptual tentang definisi atau pembatasan ilmu-ilmu di dalam sistem pendidikan Islam itu sendiri, atau dalam konteks Indonesia adalah sistem pendidikan nasional. Krisis konseptual yang dimaksud adalah pembagian ilmu-ilmu di dalam Islam,

yaitu pemisahan ilmu-ilmu profan (ilmu-ilmu keduniaan) dengan ilmu-ilmu sakral (ilmu -ilmu agama). Di dalam sejarah yang terkenal dengan *historical accident* (kecelakaan sejarah) (Abdul Munir Mulkhan, 1998: 77). Ketika itu, ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh ahli ra'yu (rasional) ditentang oleh fukaha. Ahli ra'yu yang dipelopori oleh tokoh-tokoh muktazilah mengalami kekalahan kemudian tersingkir. (Azyumardi Azra, 1995: 23)

4. Krisis kelembagaan disebabkan karena adanya dikotomi antara lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan pada salah satu aspek dari ilmu-ilmu yang ada, apakah ilmu-ilmu agama ataukah ilmu-ilmu umum. Misalnya dengan adanya dualisme sistem pendidikan, pendidikan agama yang diwakili oleh madrasah dan pesantren dengan pendidikan umum, di tingkat perguruan tinggi terdapat IAIN dengan perguruan tinggi umum (Abdul Munir Mulkhan, dkk. 1998: 80. Lihat juga: Sultan Takdir Alisyahbana, 1992: 214).
5. Pendidikan Islam krisis metodologi dan krisis pedagogi. A. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa metodologi yang dimiliki Islam pada umumnya dan IAIN pada khususnya sangat lemah.<sup>5</sup> Sekarang ini makin banyak kecenderungan di kalangan lembaga-lembaga Islam bahwa yang terjadi adalah lembaga merupakan *process teaching* proses pengajaran daripada *procces learning*, proses pendidikan. Proses pengajaran hanya mengisi aspek kognitif/intelektual, tapi tidak mengisi aspek pembentukan pribadi/watak sehingga pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses *long life education*. Isu seperti ini menjadi sangat relevan dengan zaman sekarang, yang disebut sebagai jaman pascamodernisme (posmodernisme); suatu masa di mana globalisasi mengakibatkan semakin dislokasi kekacauan sosial atau juga *displacement*, banyak orang yang tersingkir dan teralienasi, dan lain sebagainya. Orang-orang yang berkepribadian kuat dan berkarakter akan lebih tangguh menghadapi globalisasi ataupun dampak-dampak negatifnya. (Abdul Munir Mulkhan, 1998: 84)

---

<sup>5</sup> Norouzzaman Shiddiqi, "Metode Ilmu Agama Islam atau Metode Pemahaman Agama Islam menurut Prof. Dr. H.A. Mukti Ali", dalam 70 tahun H.A. Mukti Ali, 1993: 599. (Prof. Mukti Ali Menggugat tentang 3 kelemahan IAIN; pertama, kelemahan menguasai bahasa asing selain Arab, khususnya Inggris; kedua, kelemahan dalam metode penelitian ilmu agama Islam atau metode pemahaman Islam; dan ketiga, kelemahan dalam minat ilmu).

6. Krisis Orientasi. Lembaga-lembaga pendidikan Islam atau sistem pendidikan Islam pada umumnya lebih berorientasi ke masa silam daripada masa depan. Oleh karenanya anak didik tidak dibayangkan tantangan-tantangan masa depan. (Abdul Munir Mul Khan, 1998: 86)
7. Masih terlalu tergantung pada pola pendidikan yang digariskan pemerintah, yakni pendidikan untuk menopang program pembangunan.
8. Kekurangan dana sehingga pendidikan Islam diorientasikan kepada seluruh konsumen pendidikan Islam juga didikte oleh lembaga penentu lapangan kerja.
9. Masih labilnya sistem pendidikan nasional.
10. Perkembangan kebudayaan dan perubahan masyarakat yang cepat sehingga dunia pendidikan semakin tidak berdaya berkompotensi dengan laju perubahan masyarakat dan perkembangan kebudayaan.
11. Apresiasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam yang belum cukup menggembirakan dan hambatan psikologis yang bermula dari ketidakberdayaan pendidikan Islam dalam memenuhi logika persaingan.
12. Adanya pelapisan sosial yang didasarkan pada ukuran serba materialistik dan menyebabkan masyarakat berlomba menyerbu sekolah atau lembaga pendidikan favorit, dengan tidak mengindahkan lagi aspek ideologis yang tersembunyi di baliknya.
13. Adanya kecenderungan *mismanagement*, misalnya persaingan yang tidak sehat antar pimpinan dan kepemimpinan yang tertutup (A. Syaf'i Ma'arif, 1995: 132-133)

#### **D. Arah Modernisasi Pemikiran dan Praktik Sistem Pendidikan Islam**

Penataan kembali sistem pendidikan Islam, tidak cukup hanya dilakukan dengan sekadar modifikasi atau tambal sulam. Upaya demikian memerlukan rekonstruksi, rekonseptualisasi, dan reorientasi, antara lain sebagai berikut.

- 1) Dibutuhkan suatu konsep yang menjernihkan ambivalensi dasar filsafat, tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan Islam. Pemanfaatan teori pendidikan dari filsafat Barat dengan tetap menjadikan ajaran Islam sebagai sumber kurikulum akan berhadapan dengan tuntutan relevansi yang tidak bisa dihindari (lihat dalam Muslih Usa dan Aden Wijan AZ, 1994: 97, dan Fazlur Rahman, 1985: 155-156).

- 2) Reformulasi; merumuskan kembali ilmu-ilmu Islam. Persoalan ini tidak sederhana, bukan hanya persoalan konseptual, tetapi juga persoalan-persoalan yang kadang-kadang sarat dengan ideologis. Moh. Shobari menjelaskan bahwa terjadinya proses ideologis terhadap Islam karena menganggap ilmu-ilmu Islam (ilmu-ilmu agama) adalah ilmu yang paling tinggi. Sikap ini menyebabkan ilmu-ilmu eksakta terlantarkan.
- 3) Pengembangan sikap penerimaan kultural yang sadar terhadap perubahan akan menciptakan sistem pendidikan yang lebih berorientasi ke masa depan (*future oriented*), tidak hanya sekadar berorientasi ke masa belakang (*past oriented*).
- 4) Rekonstruksi kelembagaan. IAIN mungkin ada baiknya meniru al-Azhar, dalam pengertian sudah saatnya di IAIN harus dikembangkan fakultas-fakultas umum, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh UIN Jakarta, UIN Malang dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5) Perumusan kembali makna pendidikan. Sesuai dengan pendapat Naquib Al-Attas bahwa proses pendidikan Islam yang kita tempuh lebih baik menggunakan istilah ta'dib dari pada tarbiyah. Oleh karena ta'dib mengandung proses inkulturasi dan proses pembudayaan. Tidak hanya proses intelektualisasi, tetapi karena ta'dib adalah manusia yang betul-betul berbudaya, berkarakter, dan berakhlak. Kalau tarbiyah hanya lebih menekankan aspek intelektualisme dan kognitif sehingga mengalami kepincangan.
- 6) Keharusan dilakukan pendekatan baru dalam proses kependidikan itu sendiri. Pendidikan harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan berkeseimbangan.
- 7) Penumbuhan semangat *scientific inquiry* (semangat penelitian ilmiah) dan semangat ingin tahu pada anak didik. (Abdul Munir Mul Khan, 1998: 86-95).

Sehubungan dengan hal ini, A.M. Saefudin, dkk. menjelaskan bahwa di dalam meningkatkan sumber daya insani yang berkualitas perlu dilakukan *positiviensi*, pengembangan, dan peningkatan delapan hal berikut dalam rangka memperbaiki kesiapan kita menyongsong tantangan masa depan.

- 1) Daya baca terhadap berkehidupan yang sedang dijalani.
- 2) Daya jawab terhadap problematika yang muncul.

- 3) Integrasi pribadi (menghilangkan *split of personality*).
- 4) Integrasi wawasan (menghilangkan dikotomi pandangan).
- 5) Kemampuan memelihara alam.
- 6) Kemampuan menjabarkan misi Islam.
- 7) Orientasi kosmopolit.
- 8) Input sains, teknologi dan metodologi (A.M. Saefudin, 1993: 106).

Dengan menyadari kelemahan dan kepincangan sistem pendidikan tinggi Islam yang berjalan selama ini, hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk menciptakan sistem pendidikan Islam sebagai alternatif yang responsif terhadap perkembangan, perubahan, dan kebutuhan masyarakat dengan tidak melepaskan tujuan dan dasar yang asasi dari pendidikan Islam itu sendiri.

### E. Penutup

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dan kepincangan sistem pendidikan Islam yang telah berjalan dan terlaksana selama ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. *Pertama*, Ketidaksiapan dunia Islam dalam mempersiapkan proses dan kelahiran sistem alternatif pendidikan Islam yang dinamis dan adaptif terhadap tuntutan dunia baru. *Kedua*, Ketidakmampuan dunia Islam pada umumnya dalam membaca dan mempersiapkan antisipasi terhadap perkembangan dan perubahan zaman.

Dalam menghadapi perkembangan industrialisasi dan globalisasi yang begitu cepat, maka sistem pendidikan Islam harus *future oriented*, baik dari segi dasar filosofisnya, metode, kurikulum, maupun dari segi lainnya sehingga menghasilkan output (para lulusan yang berkualitas dan mampu berperan di tengah masyarakat dengan tidak melepaskan identitasnya yang asasi).

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Moeslim (1997). *Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abraham, M. Francis (1980). *Perspective on Modernization: Toward a General Theology of Third World Development*, University Press of America.
- Al-Abrasyi, M. Athiah (1970). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Ali, Muhammad (2006). *Islam Muda: Liberal, Post-Puritan, Post-Tradisional*. Yogyakarta: Apeiron Philotes.
- Ali, Mukti (1991). *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alisyahbana, Sultan Takdir (1992). *Pemikiran Islam dalam Menghadapi Globalisasi dan Masa Depan Umat Manusia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Asrofah, Harun (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Asy'ari, Musa (1999). *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Azizy, A. Qodri, dkk. (2005). *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: STAIN Ternate bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos.
- \_\_\_\_\_ (1995). *Beberapa Persoalan yang Dihadapi Pendidikan Islam dan Tradisi Pesantren dalam Modernitas*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.
- \_\_\_\_\_ (1990). *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, Jakarta: Logos.
- Bakker SJ., J.W.M. (1984). *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kanisius.
- Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga (1992). *Pengantar Ke Arah Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama Islam*. Yogyakarta: Publikasi II.
- Ditbinperta (1995). *Topik Inti Kurikulum Nasional IAIN Fakultas Tarbiyah*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam.
- Fajar, A. Malik (1999). *Reorientasi Pendidikan Islam*, Dhorifi Umar dan Sulthon Fa. Dja'far (eds.), Jakarta: Fajar Dunia.
- Gauhar, Altaf (1982). *Tantangan Islam*. Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka.
- Ghazali, Adeng Muchtar (2005). *Pemikiran Islam Kontemporer, Suatu Refleksi Keagamaan yang Dialogis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Karim, M. Rusli (1991). "Pendidikan Islam di Indonesia dalam Transformasi Sosial Budaya" dalam Muslih Usa (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Kung, Hans (2002). *A Global Ethics for Global Politics and Economics*, terj. Ali Noer Zaman "Etika Ekonomi-Politik Global: Mencari Visi Baru bagi Kelangsungan Agama Abad XXI, Jakarta: Qalam.
- Langgulong, Hasan (1985). *Pendidikan Peradaban Islam*. Jakarta: al-Husna.
- \_\_\_\_\_ (1998). *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*. Jakarta: al-Husna.
- Lisa, Muslih dan Aden Wijdan SZ. (1997). *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ma'arif, A. Syafi'i, dkk. (1991). *Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- \_\_\_\_\_ (1995). *Para Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish (1994). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Muhaimin et.al. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, Abdul Munir, dkk. (1998). *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren-Regiu sitas IPTEK*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Harun (1975). *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Natsir M. (1973). *Kapita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Pranowo, H.M. Bambang (2002). "Reformasi Pendidikan Islam dalam Millenium III" dalam Mudjia Rahardjo, *Quo Vadis Pendidikan Islam: Pembacaan Realitas Pendidikan Islam, Sosial dan Pengetahuan*, Malang: Cendekia Putramulya.
- Rahman, Fazlur (1985). *Imam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka.
- Saefuddin, A.M, dkk. (1993). *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islami*. Bandung: Mizan.
- Sasono, Adi, dkk. (1988). *Solusi Islam Atas Problematika Umat*. Jakarta: Gema Insani.
- Shiddiqi, Norouzzaman (1993). *Metode Ilmu Agama Islam atau Metode Pemahaman Agama Islam Menurut Prof. Dr. H.A. Mukti Ali dalam 70 tahun H.A. Mukti Ali, Agama dan Masyarakat*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

- Soemarjan, Selo dan Soelaman Soemardi (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: FE UI.
- Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyanto dan Djihad Hasyim (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa.
- Tabrani dan Arifin, Syamsul (1994). *Islam Pruralisme Budaya dan Politik*. Yogyakarta: SIPRESS.
- Tabrani. ZA (2013). *Modernisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Dalam *Jurnal Serambi Tarbawi* Vol. I, No. 1 Januari 2013.
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Islam dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia.
- Yunus, Mahmud (1984). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.

\*\*\*\*\*

